



KOTA PALU

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100.3/5397/HUKUM/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah atas Peraturan Daerah (Perda) yang berkualitas, perlu dilakukan pengusulan perencanaan pembentukan Perda;

b. bahwa dalam rangka tertib pembentukan Perda di lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penetapan pengusulan perencanaan pembentukan Perda;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa Perda yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk segera menyusun Naskah Akademik/ Penjelasan/ Keterangan disertai rancangan Perda berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu.

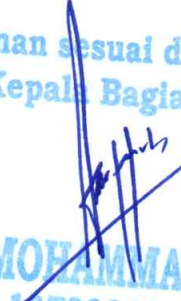
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 03/11/2025

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100.3/5397/HUKUM/2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KUMULATIF PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2026

NO	JUDUL RAPERDA	CATURWULAN	PELAKSANAAN DARI	INSTANSI TERKAIT
1	2	3	4	5
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	II Tahun 2026	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2026	II Tahun 2026	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2027	III Tahun 2026	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2026

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Pangan	a. Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan; b. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan; c. Penanganan Kerawanan Pangan; d. Keamanan pangan; e. Pengawasan Keamanan Pangan Segar.	√		1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiamana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Caturwulan II Tahun 2026	Naskah Akademik
2.	Peraturan Daerah	Pengendalian Pengawasan Beralkohol dan Minuman	a. Kewenangan; b. Jenis dan Klasifikasi Minuman Beralkohol; c. Penjualan dan Peredaran; Tradisional; Beralkohol d. Minuman Beralkohol e. Pengendalian dan Penjualan Pengawasan dan Peredaran; f. Peran Serta Masyarakat; g. Larangan.	√		1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiamana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Perpres No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol 4. Permendagri No. 20/M-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian ; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; Satuan Polisi Pamong Praja	Caturwulan II Tahun 2026	Naskah Akademik

					DAG/PER/4/ 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendag No. 25 Tahun tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol			
3.	Peraturan Daerah	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	a. Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat b. Tanggung jawab dan peran Pemerintah Daerah c. Pemantauan dan Evaluasi d. pendanaan e. pembinaan dan pengawasan	✓	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ; Dinas Kesehatan	Caturwulan I Tahun 2026	Naskah Akademik

						Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
					✓	7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat			
4.	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Pengaturan terkait rokok elektronik		✓	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Caturwulan I Tahun 2026	Naskah / Penjelasan Akademik
5.	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Perubahan ketentuan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta penambahan beberapa objek baru pajak dan retribusi daerah		✓	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Badan Pendapatan	Caturwulan I Tahun 2026	Penjelasan Akademik

